

Pembenahan Infrastruktur Kawasan Sekumpul



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/komisi-v-dpr-ri-bersama-stakeholder-terkait-rencanakan-pembenahan-kawasan-sekumpul>

Tak hanya Bandara Internasional Syamsuddin Noor yang baru saja diresmikan RI 1 beberapa waktu belakangan, aspek infrastruktur di kawasan Langgar Ar Raudah, Sekumpul, Martapura juga menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan bersama mitra kerjanya Kementerian PUPR termasuk Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Kalsel, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Wilayah Kalselteng bekerjasama dengan Pemkab Banjar berencana membenahi kawasan tersebut di Tahun 2020.

Melalui kegiatan resesnya, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda nyatakan sudah berkoordinasi tahap awal dengan beberapa stakeholder dari Kementerian, Balai dan Pemkab Banjar untuk membahas hal tersebut. Diantaranya dengan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Kalsel, M Reva Sastrodiningrat, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Wilayah Kalselteng, Budi Harimawan, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Dwi Purwantoro, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah XV Kalsel Kementerian Perhubungan, Iman dan Sekda Kabupaten Banjar, M Hilman serta Lurah Sekumpul, Gusti Mahrusin.

Mereka juga sudah sempat melakukan ziarah ke lokasi Makam Guru Sekumpul dan melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di kawasan Langgar Ar Raudah Sekumpul, Kamis (26/12/2019). Dijelaskan Rifqi, rencana penataan dan pembenahan kawasan ini termasuk akses jalan, trotoar, pedestrian, drainase, tempat parkir, taman, kios-kios hingga kawasan inti Langgar Ar Raudah.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/komisi-v-dpr-ri-bersama-stakeholder-terkait-rencanakan-pembenahan-kawasan-sekumpul>.)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan, Perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Sekumpul yang hadir dalam Forum Konsultasi Publik tentang Perencanaan DED Revitalisasi Sistem Jaringan Saluran Drainase Kawasan Sekumpul yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar di Aula Mahabbah, Komplek Ar-Raudhah, Kelurahan Sekumpul pada jumat malam (21/12), sepakat menyetujui rencana pemerintah Kabupaten Banjar untuk menata ulang saluran drainase yang ada di Kawasan Sekumpul, utamanya ada di sepanjang Jalan Sekumpul. PUPR merencanakan, tepi jalan Sekumpul akan ada saluran inlet atau masuknya air untuk yang berada di permukaan jalan, yang mana sesuai rencana sistem tersebut bisa bertahan hingga waktu 50 tahun dengan genangan hanya terjadi 2 kali selama 1 tahun, dengan ketinggian genangan 30 cm itu pun hanya menggenang selama 2 jam.

Selain itu, menurut Kepala Dinas PUPR, desain ini juga dirancang untuk menguraikan kemacetan yang terjadi di Kawasan Sekumpul melalui pelebaran jalan sehingga nantinya Jalan Sekumpul bisa dilalui oleh dua truck yang berselisihan tanpa menimbulkan kemacetan seperti sekarang. “Makanya kami memerlukan pelebaran jalan hingga 13 meter, jadi memerlukan tambahan 3 meter masing-masing disisi jalan dari jalan yang ada sekarang,” tambahnya. Kepala Dinas PUPR membeberkan, pengerjaan fisik akan di mulai di kawasan Pintu Air, Tanjung Rema Darat pada tahun 2019 karena Dinas PUPR ingin membangun hilir dulu sebelum membangun bagian hulu yang ada di Jalan Sekumpul. “Nanti dengan desain yang kami buat ini, air yang menggenang di Jalan Sekumpul dan sekitarnya akan di buang ke Pintu Air,” ucapnya. Forum

Konsultasi Publik ini dihadiri oleh Bupati Banjar H. Khalilurrahman, Kepala Dinas PUPR Mokhammad Hilman, Kepala Dinas Kesehatan Ikhwansyah, Kepala Dinas Kominfo H. Farid Soufian, Camat Martapura Ahmad Junaidi dan Lurah Sekumpul Gusti Marhusin.

(Diringkas dari <https://www.teras7.com/2018/12/22/tahun-2020-pupr-akan-bangun-drainase-moderen-dan-pelebaran-jalan-di-sekumpul/>.)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/komisi-v-dpr-ri-bersama-stakeholder-terkait-rencanakan-pembenahan-kawasan-sekumpul>, 27 Desember 2019.
2. <https://www.teras7.com/2018/12/22/tahun-2020-pupr-akan-bangun-drainase-moderen-dan-pelebaran-jalan-di-sekumpul/>, 22 Desember 2018.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan

dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna

terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.